

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN PADANG TAHUN  
ANGGARAN 2011-2013**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III sebagai  
salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madyah*



**Oleh:**

**DELFA**

**2011-1109196**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

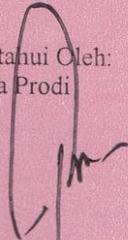
**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2011-2013**

Nama : Delfia  
NIM : 1109196  
Program Studi : Akuntansi DIII  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 06 Februari 2015

Diketahui Oleh:  
Ketua Prodi

  
Perengki Susanto SE,M.Sc  
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh:  
Pembimbing

  
Henri Agustin SE,M.Sc,Ak  
NIP. 19771123 200312 1003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

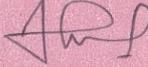
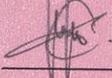
**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2011-2013**

Nama : Delfia  
NIM : 1109196  
Program Studi : Akuntansi DIII  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Padang, 06 Februari 2015

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	(Ketua)	
2. Mayar Afryenti, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Charoline Cheisviyanny, SE, MAK, AK	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Delfia  
Nomor masuk/NIM : 1109196  
Tempat /Tgl.Lahir : Bengkulu, 28 juni 1992  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik (ASP)  
Alamat : Air Molek, Riau  
Judul Tugas Akhir : Analisis Laporan Keuangan Pada KPPN Padang Tahun Anggaran 2011-2013

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di universitas lain .
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila si kemudian hari dapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini , serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2015

Yang menyatakan,



Delfia  
Nim.110916

## **ABSTRAK**

**Delfia : Analisis Laporan Keuangan Pada KPPN Padang Tahun  
Anggaran 2011-2013**

**Pembimbing : Henri Agustin, SE. M.Sc.AK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2011-2013 dengan menggunakan analisis asset dan mengetahui bagaimana kinerja keuangan KPPN dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam penelitian ini menghimpun dokumen-dokumen yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca, dan laporan realisasi anggaran yang dijadikan dasar untuk melihat bagaimana rasio keuangan dan analisis asset Tahun 2011-2013 yang terjadi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan kinerja keuangan KPPN padang tahun 2011-2013 berdasarkan analisis asset menunjukkan pertumbuhan asset yang kurang baik dikarenakan adanya penurunan asset dan kemunduran nilai asset yang disebabkan pengelolaan asset yang kurang terkendali. Sedangkan kinerja KPPN padang tahun 2011-2013 berdasarkan rasio likuiditas ( rasio lancar, rasio kas, working capital to total assets ratio dan rasio derajat desentralisasi) menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup baik.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalammu 'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa pula sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN PADANG TAHUN ANGGARAN 2011-2013 (Analisis asset dan analisis Rasio Keuangan) sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madyah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, pengarahan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk orangtua yang telah memberikan motivasi, semangat, dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Perengki Susanto, SE. M.Sc selaku ketua prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak Henri Agustin,SE.M.Sc.AK selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Bapak/Ibu dosen selaku staf pengajar pada Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Karyawan/ti Proram Diploma III FE UNP, terimakasih atas semua bantuan dan informasi serta membantu dalam melancarkan administrasi penulis.
6. Sahabat dan teman-teman terdekatku terimakasih atas perhatian, dukungan, semangat dan do'anya.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan pada Tugas Akhir ini, untuk itu penulis mengahrapkan kritikan dan saran yang bermanfaat demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terimakasih, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, Desember 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Defenisi Laporan Keuangan .....	6
B. Tujuan Laporan Keuangan .....	7
C. Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik .....	8
D. Analisis Laporan Keuangan .....	11
E. Analisis Aset .....	16
F. Analisis Rasio Keuangan .....	18
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>

A. Bentuk Penelitian .....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Rancangan Penelitian .....	23
D. Jenis dan Sumber Data .....	24
E. Tahap Penelitian .....	25
F. Objek Penelitian .....	26
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Profil Perusahaan .....	27
B. Pembahasan .....	34
a. Analisis Aset .....	34
b. Menghitung Modal Kerja.....	37
c. Analisis Rasio Keuangan .....	41
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pos Aset Neraca 2011-2012.....	35
Tabel 2. Perbandingan Nilai Pos Aset Neraca 2012-2013.....	37
Tabel 3. Proporsi Kelompok asset Terhadap Total Aset.....	38
Tabel 4. Modal KerjaNeraca KUN KPPN Padang .....	42
Tabel 5. Rasio Lancar Neraca KUN KPPN Padang .....	44
Tabel 6. Rasio Kas Neraca KUN KPPN Padang .....	45
Tabel 7. Rasio Cepat Neraca KUN KPPN Padang .....	47
Tabel 8. Rasio Working Capital to Aset Neraca KUN KPPN Padang .....	49
Tabel 9. Rasio Solvabilitas Neraca KUN KPPN Padang.....	50
Tabel 10. Rasio Utang Terhadap Ekuitas Neraca KUN KPPN Padang.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Laporan Arus Kas 2011-2013

Lampiran 2. Neraca 2011-2013

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran 2011-2013

Lampiran 4. Surat Observasi Tugas Akhir

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas dari pemerintah merupakan salah satu indikasi tegaknya perekonomian suatu negara. Pemerintah yang akuntabel merupakan pemerintah yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik. Sumber daya publik yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan keberlangsungan roda pemerintah, dalam setiap sumber daya publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban tertulis berupa penyajian laporan keuangan atas kinerja yang telah dicapai.

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pemerintah adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sumber untuk melakukan analisis laporan keuangan adalah laporan keuangan utama yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran. Fungsi utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik.

Analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik dilakukan dengan cara membandingkan kinerja satu periode dengan periode sebelumnya

berdasarkan laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2007) terdapat beberapa teknik dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu antara lain: analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas, analisis pendapatan, dan analisis belanja. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menggambarkan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu organisasi sektor publik selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penatausahaan penerimaan negara dan pertanggungjawaban pelaksana anggaran. Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka menuju tata laksana kelola pemerintah yang baik (*good governance*), KPPN sebagai salah satu aparatur negara telah melakukan perubahan paradigma layanan dengan cara memberikan layanan yang cepat, tepat, akurat, tanpa biaya serta proses pekerjaan yang transparan (Dirjen Perbendaharaan, 2009).

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pemerintah dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan

laba-rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi. Laporan keuangan perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja tersebut meningkat atau bahkan menurun dan didalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Untuk menganalisis laporan keuangan KPPN Padang hanya bisa menggunakan rasio lancar, rasio kas, rasio working capital to assets, rasio utang terhadap ekuitas. Karena pada KPPN Padang hanya memiliki asset lancar dan hutang lancar

Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui pelayanan KPPN menggunakan analisis laporan keuangan pada laporan keuangan KPPN Padang. Dikarenakan pada kantor KPPN tidak adanya penganalisisan laporan keuangan yang khusus terkait dengan laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN PADANG TAHUN ANGGARAN 2011-2013”** (Analisis Aset dan Analisis Rasio Keuangan).

## **B. Identifikasi Masalah**

- a. Analisis asset karena pada tiap pos-pos asset memperlihatkan seberapa besar kenaikan atau penurunan pos pada asset setiap tahunnya.
- b. Rasio lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah dengan utang jangka pendek.
- c. Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah dibagi dengan utang lancar.

- d. Rasio cepat membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar.
- e. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi keseluruhan kewajibannya.
- f. Rasio utang terhadap ekuitas guna mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

### **C. Batasan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar peneliti lebih focus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu menganalisis asset, mengukur rasio keuangan dengan menggunakan rasio lancar, rasio kas, rasio working capital to asset, dan rasio utang terhadap ekuitas.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

- a. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2011-2013 menggunakan analisis aset?
- b. Bagaimana kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2011-2013 menggunakan analisis rasio keuangan (rasio lancar, rasio kas, rasio working capital to asset dan rasio hutang terhadap ekuitas) ?

### **E. Tujuan Penelitian**

- a. Mahasiswa dapat mempraktekan ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan lapangan seperti instansi pemerintah serta dapat menambah keterampilan mahasiswa yang tidak didapat dari bangku perkuliahan.
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2011-2013 menggunakan analisis aset.
- c. Untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2011-2013 menggunakan analisis rasio keuangan.

### **F. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis

Sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat lulusnya diperkuliahan serta memberi pengetahuan untuk memperhitungkan bagaimana kinerja keuangan KPPN Padang lewat analisis aset dan analisis rasio keuangan.

- b. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan informasi mengenai penggunaan analisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan KPPN Padang berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2011-2013.

- c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan informasi mengenai penggunaan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik dan penambahan referensi bacaan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Defenisi Laporan Keuangan**

Menurut Mahmudi (2007: 11), laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membantu keputusan social, politik dan ekonomi, sahingga keputusan yang diambil bisa berkualitas

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2003: 49), laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya (Dwi Prastowo D dan Rifka Juliati 2002: 8).

Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak luar perusahaan, mengenai posisis keuangan dan hasil usaha perusahaan (Soemarso, 2002: 34).

Dari beberapa pengertian laporan keuangan, maka dapat diambil kesimpulan pengertian laporan keuangan merupakan suatu informasi yang penting menggambarkan posisi keuangan dan dampak keuangan dari transaksi organisasisektor swasta (perusahaan) atau organisasi sektor publik sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkualitas.

## **B. Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi (Prastowo dan Juliati, 2002: 5).

Menurut Mahmudi (2007: 4), adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politi.
- b. Untuk alat akuntabilitas publik.
- c. Untuk memperikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan laporan keuangan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dalam

Mahmudi (2007: 45), antara lain:

- a) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan unttuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kesimpulan dari tujuan laporan keuangan adalah laporan keuangan bertujuan menyajikan atau memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan, laporan keuangan juga merupakan alat akuntabilitas publik.

### **C. Laporan Keuangan Organisasi Sektor publik**

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Darise, 2008: 238).

Dalam Mahmudi (2007: 61), jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi:

- a. Neraca.
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c. Laporan Arus Kas (LAK).
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Laporan Keuangan BUMD.

Dari kelima jenis laporan tersebut, biasanya dipublikasikan di media massa hanya tiga laporan utama saja, yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Pengertian dari tiga laporan utama, antara lain:

**a) Pengertian Neraca**

Neraca adalah laporan keuangan yang dapat memberi informasi tentang sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan sumber perbelanjaan untuk meperolehnya (Soemarso, 2002: 34).

Neraca yaitu suatu laporan yang disusun dengan tujuan untuk menggambarkan posisi (kondisi) keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu (snapshot keuangan perusahaan), yang meliputi aset perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri).

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan (Mahmudi, 2007: 62).

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Darise, 2008: 240).

Dari beberapa pengertian neraca, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta dan memberikan informasi bagi penggunaannya dalam periode tertentu.

**b) Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Bastian (2007: 387), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode.

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan (Darise, 2008: 239).

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD/APBN (KSAP, 2005: PSAP 0109). Menurut Mahmudi (2007: 67), laporan realisasi anggaran terdiri dari empat elemen (pos) utama, yaitu: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan selisih lebih pembiayaan anggaran (siLPA).

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dari organisasi sektor publik dan juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

**c) Pengertian laporan arus kas**

Laporan arus kas menggambarkan/menunjukkan gerakan uang kas yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan uang kas dalam periode yang bersangkutan (Riyanto dan Munawir, 1976: 63).

Menurut Bastian (2007: 380), laporan arus kas adalah laporan menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Darise, 2008: 245).

Menurut Mahmudi (2007: 71), laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama, yaitu: arus kas dari operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran.

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (KSAP, 2005: PSAP 035).

Kesimpulan dari beberapa pengertian laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan posisi dan perubahan posisi kas dari arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran pada organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta.

#### **D. Analisis Laporan Keuangan**

##### **a. Defenisi Analisis Laporan Keuangan**

Menurut soemarmo (2002: 21), analisis laporan keuangan (financial statement analysis) pada hakikatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahannya.

Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur tersebut, dengan tujuan

untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri (Prastowo dan Juliati, 2002: 52).

Menurut Mahmudi (2007: 9), analisis dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Kesimpulan dari pengertian analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis atau penelaahan atau mempelajari laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang baik dan tepat untuk pengambilan keputusan pada organisasi sektor public atau organisasi sektor swasta.

#### **b. Tujuan analisis laporan keuangan**

Menurut Prastowo dan Juliati (2002: 53), analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, misalnya:

- a) Dapat digunakan sebagai alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi atau merger.
- b) Sebagai alat *fore casting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan dimasa datang.
- c) Sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya.
- d) Sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.

#### **c. Metode Analisis Laporan Keuangan**

- a) Analisis Vertikal

yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos

lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

b) Analisis Horisontal

Analisis Horisontal yaitu analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Menurut Prastowo dan Juliati (2002), secara umum metode analisis laporan keuangan dapat di klasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Metode Analisis Horisontal (dinamis)

Metode Analisis Horisontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya.

2. Metode Analisis Vertikal (statis)

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos satu dan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama

**d. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik**

Adapun pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan daerah menurut Widodo dalam Halim (2007: 232), antara lain:

- a). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari pemilik daerah (Masyarakat)
- b). Pihak esekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

- c). Pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d). Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia member pinjaman ataupun membeli obligasi.

**e. Teknik Analisis Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik**

Menurut Mahmudi (2007), teknik analisis laporan keuangan organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

a). Analisis Aset

Analisis aset dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan dan potensiekonomi pemerintah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu, bagaimanakah skalaekonomi pemerintah daerah dan kondisi keuangannya.

b). Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana

Analisis utang sangat penting bagi calon pemberi pinjaman (kreditur) dalam membuat keputusan kredit, sedangkan bermanfaat untuk mengetahui beban utang, kesinambungan fiskal, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah.

Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi komposisiekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui orientasi alokasi dana pemerintah daerah yaitu seberapa besar dana yang ditanamkan untuk operasional rutin, dan seberapa dalam bentuk investasi.

c). Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai daerah.

d). Analisis Belanja

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*). Belanja daerah perlu memperoleh perhatian lebih besar karena belanja daerah lebih rawan mengalami kebocoran anggaran dibandingkan kebocoran pada sisi pendapatan.

e). Analisis Pembiayaan

Informasi pembiayaan penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat. Struktur pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah yang juga berpengaruh pada tingkat rasio daerah.

f). Analisis Laporan Arus Kas

Dalam membaca dan memahami laporan arus kas, fokus perhatian hendaknya tidak ditujukan pada jumlah kenaikan atau penurunan kas selama satu periode, karena jumlah arus kas neto saja kurang memberi informasi yang bermakna. Yang paling penting justru informasi dari masing-masing komponen arus kas secara individual.

### **E. Analisis Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya (Mahmudi, 2007: 97).

Analisis Aset terdiri dari beberapa teknik, menurut Mahmudi (2007) antara teknik tersebut lain:

#### a). Analisis Pertumbuhan Tiap-tiap Pos Aset dalam Neraca

Tujuan melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca adalah untuk mengetahui perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berturut-turut, apakah terjadi kenaikan ataukah penurunan. Secara umum, kenaikan aset tahun sekarang dari tahun sebelumnya memberikan kesan positif yang menunjukkan adanya kemajuan atau pertumbuhan aset. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan aset, maka itu berarti sinyal negative mungkin telah terjadi kemunduran, penurunan nilai aset, penggerogotan aset, dan inefisiensi dalam pengelolaan aset.

Untuk mengetahui pertumbuhan tiap-tiap pos aset dapat menghitung dengan cara :

$$\frac{\text{Neracatahunsesudahnya} - \text{neracatahunsebelumnya}}{\text{Neracatahunsebelumnya}} \times 100\%$$

#### b). Analisis Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset

Analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset bermanfaat untuk melihat potret asset pemerintah daerah secara lebih global. Apakah kelompok aset tertentu terlalu besar sehingga kurang baik bagi kesehatan keuangan organisasi. Sebagai contoh, jika asset pemerintah daerah sebagian besar berupa aset lancar, maka hal itu kurang menguntungkan jika dilihat dari kaca mata manajemen keuangan daerah dan manajemen kas karena keuangan terlalu likuid (*overliquid*). Sebaliknya, jika sebagian besar aset merupakan aset tetap, sementara itu aset lancar kecil, maka keadaan tersebut juga akan mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah yaitu kondisi keuangan menjadi tidak likuid (*illiquid*).

Untuk menghitung proporsi kelompok aset terhadap total aset dapat menggunakan cara :

$$\frac{\text{Jumlah aset lancar}}{\text{Jumlah aset non lancar}} \times 100\%$$

#### c). Analisis Modal Kerja (*Working Capital*)

Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan dan penggunaan pembiayaan lainnya. Analisis modal kerja merupakan suatu ukuran arus kas bukan sebagai rasio. Hasil analisis modal harus membarikan nilai positif. Secara umum, semakin tinggi modal kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik.

Rumus menghitung modal kerja yaitu:

$$\text{ModalKerja} = \text{AsetLancar} - \text{KewajibanLancar}$$

## **F. Analisis Rasio Keuangan**

Dalam Mahmudi (2007: 92), beberapa jenis rasio keuangan memang ada yang kurang relevan untuk sektor publik, seperti analisis perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aset, ROA, dan ROI. Rasio-rasio tersebut lebih cocok untuk sektor bisnis yang mencari laba, karena tujuan menggunakan rasio tersebut adalah dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, di sektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan di sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun, ada juga analisis rasio keuangan yang dapat digunakan baik di sektor bisnis maupun publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas.

Rasio-rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain:

### **a. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya berdasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis rasio likuiditas ada beberapa rasio yang perlu dipelajari, yaitu:

### 1. Rasio lancar ( current ratio)

Rasio lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya.

Nilai standar rasio lancar yang dianggap lancar adalah 2:1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1:1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar. Dengan kata lain bahwa jika nilai aktiva lebih besar 2x lipat dari hutang lancar maka rasio lancar tersebut 2:1 dan dianggap lancar, apabila aktiva lancar dan hutang lancar memiliki jumlah yang sama besar maka rasio tersebut masih dianggap lancar karena 1:1 batas minimal rasio cepat dan membandingkan rasio satu periode dengan periode sebelumnya, jika rasio satu periode lebih besar dibandingkan dengan rasio sebelumnya maka rasio tersebut dikategorikan baik, jika sebaliknya maka rasio tersebut dianggap buruk.

Rumus Rasio Lancar yaitu:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

### 2. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan

pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang dimiliki pemerintah daerah.

Rumus Rasio Kas yaitu:

$$Rasio\ Kas = \frac{Kas}{Utang\ Lancar}$$

### 3. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1: 1.

Rumus Rasio Cepat yaitu:

$$Rasio\ Cepat = \frac{Aktiva\ Lancar - Persediaan}{Utang\ Lancar}$$

#### b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Rumus Solvabilitas yaitu:

$$Rasio\ Solvabilitas = \frac{Total\ Aktiva}{Total\ Utang}$$

### 1. Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dan yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang, dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar.

Rumus Rasio Hutang Terhadap Ekuitas yaitu:

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

### 4. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menghitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rumus rasio ini yaitu:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### **G. Analisis Pertumbuhan Belanja**

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik.

Rumus Analisis Pertumbuhan Belanja yaitu:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{R. \text{ Belanja thn} - R. \text{ Belanja Thn}}{\text{Realisasi Belanja Thn}}$$

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Analisis laporan keuangan (analisis aset dan analisis rasio keuangan) pada laporan keuangan KPPN Padang tahun anggaran 2011-2013 memperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan KPPN Padang tahun 2011-2013 berdasarkan analisis aset menunjukkan pertumbuhan aset yang kurang baik. Dilihat dari tabel perbandingan nilai pos aset neraca KPPN Padang tahun 2011-2013 mengalami penurunan yang signifikan, dalam hasil perbandingan nilai pos aset neraca KPPN Padang menunjukkan angka yang negatif .
2. Kinerja KPPN Padang tahun 2011-2013 berdasarkan analisis rasio keuangan menunjukkan adanya penurunan asset. Pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan menunjukkan penurunan kinerja di bandingkan pada tahun 2011-2012. Berdasarkan rasio likuiditas (rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, dan *working capital to total assets ratio*) menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup baik. Tampak tiga tahun kebelakang hasil rasio likuiditas dan rasio solvabilitas berada dikisaran aman dari hasil tiap tahun yang ditunjukkan pada bab-bab sebelumnya. Hasil rasio utang (rasio utang terhadap ekuitas dana) menunjukkan angka yang masih berada pada kisaran aman, namun dari tahun ke tahun rasio utang mengalami peningkatan dan hal ini

menunjukkan adanya peningkatan utang yang dibebankan pada ekuitas dana KPPN Padang.

3. Analisis pendapatan dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan kemampuan keuangan yang sangat baik, karena pada dasarnya Rasio Desentralisasi  $>50$  kemampuan keuangan daerahnya dianggap sangat baik.
4. Analisis Pertumbuhan Belanja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, ini menunjukkan KPPN Padang tidak bisa mengendalikan pengeluaran dengan sebaik mungkin.

## **B. Saran**

Analisis laporan keuangan (analisis aset dan analisis rasio keuangan) pada tahun anggaran 2011-2013 memperoleh hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis aset KPPN Padang tahun 2011-2013 menunjukkan pertumbuhan aset yang tidak stabil, maka hendaknya KPPN Padang dapat memperbaiki pertumbuhan aset dengan cara meningkatkan kondisi nilai pos pada Aset lancar dan mengontrol pengeluaran tiap-tiap pos aset agar tidak terjadinya penurunan aset tiap tahunnya pada perbandingan nilai pos aset neraca KUN KPPN Padang dapat menunjukkan angka yang positif .
2. Berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan KPPN Padang tahun 2011-2013 menunjukkan kondisi kinerja yang baik pada tahun 2011, maka untuk mempertahankan dan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas KPPN Padang hendaknya meningkatkan penerimaan khususnya

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak agar tidak terjadi penurunan kinerja seperti yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas dana yang mengalami peningkatan tiap tahun, maka hendaknya KPPN Padang berusaha mengurangi utang dengan mengoptimalkan aset lancar untuk melunasi utang dan membuat batas atau standar maksimal jumlah utang yang aman bagi KPPN Padang selaku BUN.

3. Dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja, KPPN Padang mengalami kenaikan belanja tiap tahunnya. Sebaiknya KPPN Padang dapat mengatur pengeluaran sebaik mungkin dan dapat mengatur pengeluaran-pengeluaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: PT Indeks.

Dirjen Perbendaharaan. 2009. [www.dirjenperbendaharaan.go.id](http://www.dirjenperbendaharaan.go.id).

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Edy, Gede Prasetya. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offest.

Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Soemarso. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.

KSAP. PP No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2005. Jakarta: Salemba Empat.

Prastowo, Dwi D dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.

Riyanto, Bambang dan S. Munawir. 1976. *Analisa Laporan Finansiil*. Yogyakarta: Liberty.

LAPORAN ARUS KAS  
TINGKAT KUASA BUN KPPN PADANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2011  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan Negara dan Hibah		6,498,834,483,495
1. Penerimaan Perpajakan	B.2.1	5,886,485,091,062
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.2	611,749,392,433
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.2.1	27,622,405,406
b. Penerimaan PNPB Lainnya	B.2.2.2	317,183,822,549
c. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.2.3	266,943,164,478
3. Penerimaan Hibah	B.2.3	600,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		6,498,834,483,495
<b>II. Arus Kas Keluar</b>		
<b>II.a Belanja Pemerintah Pusat</b>		3,070,002,458,274
1. Belanja Pegawai	B.2.4	1,176,724,122,950
2. Belanja Barang	B.2.5	1,177,906,420,704
3. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	B.2.6	885,545,233
4. Belanja Bantuan Sosial	B.2.7	696,149,781,758
5. Belanja Lain-lain	B.2.8	18,336,587,629
<b>II.b Belanja Daerah</b>		24,981,237,477
9. Belanja Dana Perimbangan	B.2.9	24,981,237,477
10. Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian		0
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		3,094,983,695,751
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)</b>		<b>3,403,850,787,744</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>		
Penjualan Aset		2,391,345,175
a. Penjualan Aset Tetap	B.2.10	2,391,345,175
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		2,391,345,175
<b>II. Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Modal	B.2.11	1,612,700,225,839
a. Belanja Modal untuk Tanah		22,776,084,462
b. Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin		323,435,856,995
c. Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan		307,522,885,031
d. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan		896,493,097,130
e. Belanja Modal untuk Fisik Lainnya		26,469,192,261
f. Belanja Modal BLU		36,003,109,960
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		1,612,700,225,839
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)</b>		<b>(1,610,308,880,664)</b>
<b>C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>		
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		0
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	B.2.12	0
3. Pendapatan Pelunasan Piutang		0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		0
<b>II. Arus Kas Keluar</b>		
1. Pembayaran Utang Pokok Dalam Negeri		0
2. Pembayaran Utang Pokok Luar Negeri		0
3. Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0
Jumlah Arus Kas Keluar (C.2)		0
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pembiayaan (C.I - C.II)</b>		<b>0</b>
<b>D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>I. Arus Kas Masuk</b>		
1. Penerimaan Non Anggaran PFK	B.2.13	210,509,375,239
2. Penerimaan Kiriman Uang	B.2.14	12,182,665,472,638

**NERACA KAS UMUM NEGARA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2011**  
**( Dalam Rupiah )**

Uraian	Catatan	Jumlah
<b>ASET</b>		
aset Lancar		
Kas dan Bank		
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia		0
Rekening Kas di KPPN	C.2.1	116,372,676,317
Rekening Pemerintah Lainnya di Bank In	C.2.1.1	0
Kas Dalam Transito	C.2.1.2	1,950,776,986,617
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	354,683,519
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2.1.4	25,629,398,574
Jumlah Aset Lancar		2,093,133,745,027
aset Lainnya		
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.1.5	0
Jumlah Aset lainnya		0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,093,133,745,027</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.2	210,509,375,239
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2.1	22,875,657,964
Uang Muka dari KPPN	C.2.2.2	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>233,385,033,203</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	C.2.3	
Ekuitas Dana Lancar		
SAL	C.2.3.1	58,748,491,468
SILPA (SIKPA)	C.2.3.2	1,775,370,821,782
Dana Lancar BLU	C.2.3.3	25,629,398,574
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>1,859,748,711,824</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>2,093,133,745,027</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TINGKAT KUASA BUN KPPN PADANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2011  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di bawah) Anggaran	% Real Angg.
tan Negara dan Hibah					
aan Dalam Negeri	B.2.1.1	950,884,284,280	6,500,625,828,670	5,549,741,544,390	683.64%
rimaan Perpajakan		445,213,170,000	5,886,485,091,062	5,441,271,921,062	0.00%
ak Dalam Negeri		0	3,285,650,153,714	3,285,650,153,714	0.00%
ak Perdagangan Internasional		445,213,170,000	2,600,834,937,348	2,155,621,767,348	0.00%
rimaan Negara Bukan Pajak		505,671,114,280	614,140,737,608	108,469,623,328	121.45%
erimaan Sumber Daya Alam		0	27,622,405,406	27,622,405,406	0.00%
ian Pemerintah Atas Laba BUMN		0	0	0	0.00%
adapatan PNPB Lainnya	B.2.1.1	505,671,114,280	586,518,332,202	80,847,217,922	115.99%
naan Hibah		0	600,000,000	600,000,000	0.00%
<b>riah Pendapatan Negara dan Hibah (+ A.II)</b>		<b>950,884,284,280</b>	<b>6,501,225,828,670</b>	<b>5,550,341,544,390</b>	<b>683.70%</b>
<b>Negara</b>					
Negara	B.2.2.1	5,363,046,989,000	4,682,702,684,113	(680,344,304,887)	87.31%
ija Pegawai		1,129,045,521,000	1,176,724,122,950	47,678,601,950	104.22%
ija Barang		1,413,237,863,000	1,177,906,420,704	(235,331,442,296)	83.35%
ija Modal		1,923,649,881,000	1,612,700,225,839	(310,949,655,161)	83.84%
ija Pembayaran Kewajiban Utang		0	885,545,233	885,545,233	0.00%
ija Subsidi		0	0	0	0.00%
ija Hibah		0	0	0	0.00%
ija Bantuan Sosial		877,893,299,000	696,149,781,758	(181,743,517,242)	79.30%
ija Lain-Lain		19,220,425,000	18,336,587,629	(883,837,371)	95.40%
ike Daerah	B.2.2.2	24,519,351,670	24,981,237,477	461,885,807	0.00%
Perimbangan		24,519,351,670	24,981,237,477	461,885,807	0.00%
Otonomi Khusus Dan Penyesuaian		0	0	0	0.00%
<b>riah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>		<b>5,387,566,340,670</b>	<b>4,707,683,921,590</b>	<b>(679,882,419,080)</b>	<b>87.38%</b>
<b>Anggaran (B - A)</b>	B.2.3	<b>(4,436,682,056,390)</b>	<b>1,793,541,907,080</b>	<b>6,230,223,963,470</b>	<b>-40.43%</b>
<b>ayaan</b>	B.2.4	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
ayaan Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
bankan Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
Perbankan Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
ayaan Luar Negeri (Neto)		0	0	0	0.00%
arikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)		0	0	0	0.00%
arikan Pinjaman Program		0	0	0	0.00%
arikan Pinjaman Proyek		0	0	0	0.00%
ayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0	0	0	0.00%
<b>riah Pembiayaan (D.I + D.II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>PKPA (C + D)</b>	B.2.5	<b>(4,436,682,056,390)</b>	<b>1,793,541,907,080</b>	<b>6,230,223,963,470</b>	<b>-40.43%</b>

LAPORAN ARUS KAS  
TINGKAT KUASA BUN KPPN PADANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012  
(Dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	Jumlah
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>i. Arus Kas Masuk</b>			
Pendapatan Negara dan Hibah			6,707,841,957,405
1.	Penerimaan Perpajakan	B.2.1	6,056,617,840,740
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.2	650,780,116,665
a.	Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.2.1	16,253,149,115
b.	Penerimaan PNBP Lainnya	B.2.2.2	320,854,452,162
c.	Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.2.3	313,672,515,388
3.	Penerimaan Hibah	B.2.3	444,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)			6,707,841,957,405
<b>ii. Arus Kas Keluar</b>			
<b>ii.a Belanja Pemerintah Pusat</b>			
1.	Belanja Pegawai	B.2.4	1,363,696,395,545
2.	Belanja Barang	B.2.5	1,476,592,717,861
3.	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	B.2.6	0
4.	Belanja Bantuan Sosial	B.2.7	608,580,071,850
5.	Belanja Lain-lain	B.2.8	5,218,952,593
<b>ii.b Belanja Daerah</b>			
9.	Belanja Dana Perimbangan	B.2.9	27,576,576,829
10.	Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian		0
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)			3,481,664,714,678
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)			3,226,177,242,727
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
<b>i. Arus Kas Masuk</b>			
Penjualan Aset			1,177,604,868
a.	Penjualan Aset Tetap	B.2.10	1,177,604,868
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)			1,177,604,868
<b>ii. Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Modal		B.2.11	2,060,785,181,742
a.	Belanja Modal untuk Tanah		31,295,913,355
b.	Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin		331,498,480,781
c.	Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan		323,218,763,704
d.	Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan		1,336,242,215,017
e.	Belanja Modal untuk Fisik Lainnya		16,043,129,399
f.	Belanja Modal BLU		22,486,679,486
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)			2,060,785,181,742
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)			(2,059,607,576,874)
<b>C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
<b>i. Arus Kas Masuk</b>			
1.	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		0
2.	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	B.2.12	0
3.	Pendapatan Pelunasan Piutang		0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)			0
<b>ii. Arus Kas Keluar</b>			
1.	Pembayaran Utang Pokok Dalam Negeri		0
2.	Pembayaran Utang Pokok Luar Negeri		0
3.	Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0
Jumlah Arus Kas Keluar (C.2)			0
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pembiayaan (C.I - C.II)			0
<b>D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>			
<b>i. Arus Kas Masuk</b>			
1.	Penerimaan Non Anggaran PFK	B.2.13	231,341,101,919
2.	Penerimaan Kiriman Uang	B.2.14	13,418,659,989,983

3	Penerimaan Transito	B.2.15	88,432,721,485
4	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	B.2.16	47,997,544
5	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	B.2.17	28,422,117,520
	Jumlah Arus Kas Masuk (D.I)		13,766,903,928,451
<b>II. Arus Kas Keluar</b>			
1.	Pengeluaran Non Anggaran PFK	B.2.18	0
2.	Pengeluaran Kiriman Uang	B.2.19	14,761,616,766,464
3.	Pengeluaran Transito	B.2.20	88,567,513,172
4.	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	B.2.21	47,997,544
5.	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	B.2.22	32,452,929,425
	Jumlah Arus Kas Keluar (D.II)		14,882,685,206,605
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I - D.II)		(1,115,781,278,154)
	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D)</b>		<b>50,788,387,699</b>
	<b>AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN</b>		<b>0</b>
	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN</b>		<b>50,788,387,699</b>
	<b>SALDO AWAL KAS</b>		<b>132,485,173,350</b>
	<b>SALDO AKHIR KAS</b>		<b>183,273,561,049</b>
	<b>SALDO AKHIR KAS BLU</b>		<b>51,758,365,853</b>
	<b>SALDO AKHIR KAS DI K/L DARI HIBAH</b>		<b>0</b>
	<b>SALDO AKHIR KAS KPPN</b>		<b>131,515,195,196</b>

<b>Jumlah Awal Laporan</b>			132,485,173,350
<b>II. Lainnya</b>			0
<b>Jumlah Akhir Laporan</b>			183,273,561,049
<b>Jumlah Aset</b>			1,376,572,649,324
<b>KAWAIBAN</b>			
<b>Saldo Awal Laporan</b>			28,391,101,927
<b>Uang Pembiayaan Pihak Ketiga</b>			18,374,386,071
<b>Uang Simpanan Pihak Ketiga</b>			0
<b>Uang Muka dari KPPN</b>			0
<b>Jumlah Kewaiban</b>			28,391,101,927
<b>KUPTAS DANA</b>			
<b>Saldo Awal Laporan</b>			50,788,387,699
<b>Saldo Akhir</b>			1,115,804,797,894
<b>Dana Hibah</b>			0
<b>Dana Lainnya</b>			1,115,804,797,894
<b>Jumlah Kuptas Dana</b>			1,115,804,797,894
<b>Jumlah Kewaiban dan Kuptas Dana</b>			1,376,572,649,324

**NERACA KAS UMUM NEGARA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012**  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah
<b>ASET</b>		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
<i>Rekening Kas BUN di Bank Indonesia</i>		0
Rekening Kas di KPPN	C.2.1	131,486,195,196
Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia	C.2.1.1	0
Kas Dalam Transit	C.2.1.2	1,342,956,776,481
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	431,310,794
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2.1.4	51,758,365,853
Jumlah Aset Lancar		1,526,632,648,324
Aset Lainnya		
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.1.5	0
Jumlah Aset lainnya		0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,526,632,648,324</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek		
<i>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</i>	C.2.2	231,341,101,919
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2.1	18,844,846,059
Uang Muka dari KPPN	C.2.2.2	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>250,185,947,978</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
Ekuitas Dana Lancar		
SAL	C.2.3.1	93,793,537,461
SILPA (SIKPA)	C.2.3.2	1,130,894,797,033
Dana Lancar BLU	C.2.3.3	51,758,365,853
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>1,276,446,700,347</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1,526,632,648,325</b>

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TINGKAT KUASA BUN KPPN PADANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di bawah) Anggaran	% Real Angg.
n Negara dan Hibah					
n Dalam Negeri	B.2.1.1	4,780,652,985,452	6,708,575,562,273	1,927,922,576,821	140.33%
aan Perpajakan		4,236,966,672,086	6,056,617,840,740	1,819,651,168,654	0.00%
Dalam Negeri		1,942,060,972,086	4,265,958,456,366	2,323,897,484,280	0.00%
Perdagangan Internasional		2,294,905,700,000	1,790,659,384,374	(504,246,315,626)	0.00%
aan Negara Bukan Pajak		543,686,313,366	651,957,721,533	108,271,408,167	119.91%
imaan Sumber Daya Alam		0	16,253,149,115	16,253,149,115	0.00%
y Pemerintah Atas Laba BUMN		0	0	0	0.00%
ipatan PNPB Lainnya	B.2.1.1	543,686,313,366	635,704,572,418	92,018,259,052	116.92%
an Hibah		0	444,000,000	444,000,000	0.00%
h Pendapatan Negara dan Hibah (A.II)		4,780,652,985,452	6,709,019,562,273	1,928,366,576,821	140.34%
egara					
egara	B.2.2.1	5,984,053,176,000	5,514,902,319,591	(469,150,856,409)	92.16%
Pegawai		1,357,916,914,001	1,363,696,395,545	5,779,481,544	100.43%
Barang		1,694,966,572,999	1,476,592,717,861	(218,373,855,138)	87.12%
Modal		2,296,007,215,000	2,060,814,181,742	(235,193,033,258)	89.76%
Pembayaran Kewajiban Utang		0	0	0	0.00%
Subsidi		0	0	0	0.00%
Hibah		0	0	0	0.00%
Bantuan Sosial		629,943,521,000	608,580,071,850	(21,363,449,150)	96.61%
Lain-Lain		5,218,953,000	5,218,952,593	(407)	100.00%
Daerah	B.2.2.2	31,691,845,652	27,576,576,829	(4,115,268,823)	0.00%
imbangan		31,691,845,652	27,576,576,829	(4,115,268,823)	0.00%
onomi Khusus Dan Penyesuaian		0	0	0	0.00%
h Belanja Negara (B.I + B.II)		6,015,745,021,652	5,542,478,896,420	(473,266,125,232)	92.13%
anggaran (B - A)	B.2.3	(1,235,092,036,200)	1,166,540,665,853	2,401,632,702,053	-94.45%
in	B.2.4	0	0	0	0.00%
an Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
an Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
bankan Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
in Luar Negeri (Neto)		0	0	0	0.00%
in Pinjaman Luar Negeri (Bruto)		0	0	0	0.00%
ikan Pinjaman Program		0	0	0	0.00%
ikan Pinjaman Proyek		0	0	0	0.00%
aran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0	0	0	0.00%
ah Pembiayaan (D.I + D.II)		0	0	0	0.00%
A (C + D)	B.2.5	(1,235,092,036,200)	1,166,540,665,853	2,401,632,702,053	-94.45%

**LAPORAN ARUS KAS**  
**TINGKAT KUASA BUN KPPN PADANG**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013**  
(Dalam Rupiah)

	Uraian	Catatan	Jumlah
<b>A.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>I.</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Pendapatan Negara dan Hibah		6,393,336,076,781
	1. Penerimaan Perpajakan	B.2.1	5,360,264,714,124
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.2	1,030,033,669,342
	a. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.2.1	7,455,194,615
	b. Penerimaan PNBP Lainnya	B.2.2.2	680,956,628,087
	c. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.2.3	341,621,846,640
	3. Penerimaan Hibah	B.2.3	3,037,693,315
	Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		6,393,336,076,781
<b>II.</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
<b>II.a</b>	<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>		
	1. Belanja Pegawai	B.2.4	1,503,163,971,208
	2. Belanja Barang	B.2.5	1,650,189,719,888
	3. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	B.2.6	0
	4. Belanja Bantuan Sosial	B.2.7	333,426,112,534
	5. Belanja Lain-lain	B.2.8	0
<b>II.b</b>	<b>Belanja Daerah</b>		
	9. Belanja Dana Perimbangan	B.2.9	6,550,496,893
	10. Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian		0
	Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		3,493,330,300,523
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)</b>		<b>2,900,005,776,258</b>
<b>B.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	Penjualan Aset		1,080,176,229
	a. Penjualan Aset Tetap	B.2.10	1,080,176,229
	Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		1,080,176,229
<b>II.</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	Belanja Modal	B.2.11	2,219,199,471,365
	a. Belanja Modal untuk Tanah		18,869,364,980
	b. Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin		203,014,003,651
	c. Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan		305,576,104,305
	d. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan		1,575,082,542,988
	e. Belanja Modal untuk Fisik Lainnya		67,462,175,837
	f. Belanja Modal BLU		49,195,279,604
	Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		2,219,199,471,365
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)</b>		<b>(2,218,119,295,136)</b>
<b>C.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		0
	2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	B.2.12	0
	3. Pendapatan Pelunasan Piutang		0
	Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		0
<b>II.</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>		
	1. Pembayaran Utang Pokok Dalam Negeri		0
	2. Pembayaran Utang Pokok Luar Negeri		0
	3. Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0
	Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		0
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pembiayaan (C.I - C.II)</b>		<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>I.</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>		
	1. Penerimaan Non Anggaran PFK	B.2.13	245,166,406,518
	2. Penerimaan Kiriman Uang	B.2.14	13,298,362,321,349

3	Penerimaan Transito	B.2.15	147,300,593,822
4	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	B.2.16	62,269,994
5	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	B.2.17	11,251,542,174
	Jumlah Arus Kas Masuk (D.I)		13,702,143,133,857
II. Arus Kas Keluar			
1.	Pengeluaran Non Anggaran PFK	B.2.18	0
2.	Pengeluaran Kiriman Uang	B.2.19	14,317,707,004,832
3.	Pengeluaran Transito	B.2.20	148,528,695,742
4.	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	B.2.21	62,274,994
5.	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	B.2.22	20,947,073,540
	Jumlah Arus Kas Keluar (D.II)		14,487,245,049,108
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I - D.II)		(785,101,915,251)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D)			
			(103,215,434,129)
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN			
			0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN			
			(103,215,434,129)
SALDO AWAL KAS			
			183,244,561,049
SALDO AKHIR KAS			
			80,029,126,920
SALDO AKHIR KAS BLU			
			64,060,130,920
SALDO AKHIR KAS DI K/L DARI HIBAH			
			0
SALDO AKHIR KAS KPPN			
			15,968,996,000

ASET  
Aset Lancar

Kas dan Setorannya	B.2.15	147,300,593,822
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2.1.4	64,060,130,920
Jumlah Aset Lancar		1,101,075,286,582

Aset Lainnya

Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.1.5	0
Jumlah Aset lainnya		0

JUMLAH ASET

		1,101,075,286,582
--	--	-------------------

KEWAJIBAN

Kewajiban jangka Pendek

Utang Pembiayaan Pihak Ketiga	C.2.2	245,144,405,218
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2.1	2,149,389,693
Utang Akumulasi dari KPPN	C.2.2.2	0

JUMLAH KEWAJIBAN

		247,293,794,911
--	--	-----------------

EKUITAS DAN

Ekuitas Dana Lancar

SAL	C.2.3.1	111,114,727,396
SILPA (SRPA)	C.2.3.2	64,354,716,055
Dana Lancar BLU	C.2.3.3	64,060,130,920

JUMLAH EKUITAS DAN

		249,529,574,371
--	--	-----------------

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DAN

		1,101,075,286,582
--	--	-------------------

NERACA KAS UMUM NEGARA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013  
( Dalam Rupiah )

Uraian	Catatan	Jumlah
<b>ASET</b>		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia		0
Rekening Kas di KPPN	C.2.1	15,968,996,000
Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indo	C.2.1.1	0
Kas Dalam Transito	C.2.1.2	1,019,344,683,483
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	1,701,476,179
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2.1.4	64,060,130,920
Jumlah Aset Lancar		1,101,075,286,582
Aset Lainnya		
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.1.5	0
Jumlah Aset lainnya		0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,101,075,286,582</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.2	245,166,406,518
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2.1	9,149,309,693
Uang Muka dari KPPN	C.2.2.2	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>254,315,716,211</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
Ekuitas Dana Lancar		
SAL	C.2.3.1	113,114,723,396
SILPA (SIKPA)	C.2.3.2	669,584,716,055
Dana Lancar BLU	C.2.3.3	64,060,130,920
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>846,759,570,371</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1,101,075,286,582</b>

NERACA KAS UMUM NEGARA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013  
( Dalam Rupiah )

Uraian	Catatan	Jumlah
<b>ASET</b>		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia		0
Rekening Kas di KPPN	C.2.1	15,968,996,000
Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indo	C.2.1.1	0
Kas Dalam Transito	C.2.1.2	1,019,344,683,483
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	1,701,476,179
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2.1.4	64,060,130,920
Jumlah Aset Lancar		1,101,075,286,582
Aset Lainnya		
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.1.5	0
Jumlah Aset lainnya		0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,101,075,286,582</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.2	245,166,406,518
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2.1	9,149,309,693
Uang Muka dari KPPN	C.2.2.2	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>254,315,716,211</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	C.2.3	
Ekuitas Dana Lancar		
SAL	C.2.3.1	113,114,723,396
SILPA (SIKPA)	C.2.3.2	669,584,716,055
Dana Lancar BLU	C.2.3.3	64,060,130,920
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>846,759,570,371</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1,101,075,286,582</b>

**NERACA KAS UMUM NEGARA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013**  
(Dalam Rupiah )

Uraian	Catatan	Jumlah
<b>ASET</b>		
Aset Lancar		
Kas dan Bank		
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia		0
Rekening Kas di KPPN	C.2.1	15,968,996,000
Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indo	C.2.1.1	0
Kas Dalam Transito	C.2.1.2	1,019,344,683,483
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	1,701,476,179
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2.1.4	64,060,130,920
Jumlah Aset Lancar		1,101,075,286,582
Aset Lainnya		
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.1.5	0
Jumlah Aset lainnya		0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1,101,075,286,582</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.2	245,166,406,518
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.2.1	9,149,309,693
Uang Muka dari KPPN	C.2.2.2	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>254,315,716,211</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
Ekuitas Dana Lancar		
SAL	C.2.3.1	113,114,723,396
SILPA (SIKPA)	C.2.3.2	669,584,716,055
Dana Lancar BLU	C.2.3.3	64,060,130,920
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>846,759,570,371</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>1,101,075,286,582</b>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TINGKAT KUASA BUN KPPN PADANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di bawah) Anggaran	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah					
Penerimaan Dalam Negeri	B.2.1.1	3,528,967,635,739	6,391,378,559,695	2,862,410,923,956	181.11%
Penerimaan Perpajakan		2,958,424,726,026	5,360,264,714,124	2,401,839,988,098	0.00%
i. Pajak Dalam Negeri		2,958,424,726,026	4,297,150,195,462	1,338,725,469,436	0.00%
i. Pajak Perdagangan Internasional		0	1,063,114,518,662	1,063,114,518,662	0.00%
Penerimaan Negara Bukan Pajak		570,542,909,713	1,031,113,845,571	460,570,935,858	180.73%
i. Penerimaan Sumber Daya Alam		0	7,455,194,615	7,455,194,615	0.00%
i. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN		0	0	0	0.00%
i. Pendapatan PNBP Lainnya	B.2.1.1	570,542,909,713	1,023,658,650,956	453,115,741,243	179.42%
Penerimaan Hibah		0	3,037,693,315	3,037,693,315	0.00%
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)</b>		<b>3,528,967,635,739</b>	<b>6,394,416,253,010</b>	<b>2,865,448,617,271</b>	<b>181.20%</b>
Belanja Negara					
Belanja Negara	B.2.2.1	6,149,782,010,000	5,706,014,274,995	(443,767,735,005)	92.78%
Belanja Pegawai		1,567,296,509,000	1,503,163,971,206	(64,132,537,792)	95.91%
Belanja Barang		1,860,226,091,000	1,650,189,719,888	(210,036,371,112)	88.71%
Belanja Modal		2,370,080,001,000	2,219,234,471,365	(150,845,529,635)	93.64%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		0	0	0	0.00%
Belanja Subsidi		0	0	0	0.00%
Belanja Hibah		0	0	0	0.00%
Belanja Bantuan Sosial		352,179,409,000	333,426,112,534	(18,753,296,466)	94.68%
Belanja Lain-Lain		0	0	0	0.00%
Transfer ke Daerah	B.2.2.2	8,715,500,240	6,550,496,893	(2,165,003,347)	0.00%
Dana Perimbangan		8,715,500,240	6,550,496,893	(2,165,003,347)	0.00%
Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian		0	0	0	0.00%
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>		<b>6,158,497,510,240</b>	<b>5,712,564,771,888</b>	<b>(445,932,738,352)</b>	<b>92.76%</b>
Defisit Anggaran (B - A)	B.2.3	(2,629,529,874,501)	681,851,481,122	3,311,381,355,623	-25.93%
Pembayaran					
Pembayaran Dalam Negeri	B.2.4	0	0	0	0.00%
Perbankan Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
Non Perbankan Dalam Negeri		0	0	0	0.00%
Pembayaran Luar Negeri (Neto)		0	0	0	0.00%
Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)		0	0	0	0.00%
a. Penarikan Pinjaman Prrogram		0	0	0	0.00%
b. Penarikan Pinjaman Proyek		0	0	0	0.00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0	0	0	0.00%
<b>Jumlah Pembayaran (D.I + D.II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
PA/SIKPA (C + D)	B.2.5	(2,629,529,874,501)	681,851,481,122	3,311,381,355,623	-25.93%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089  
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

mor : 6481/UN35.1.7/PP/2014  
np. : -  
al : Observasi

18 September 2014

pada : Yth. Pimpinan KPPN Padang  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79  
Padang

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang berikut :

Nama : **Delfia**  
BP/NIM : 2011/1109196  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Bermaksud akan melakukan Observasi pada Instansi yang dipimpin, mengenai :  
*ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN PADANG TAHUN ANGGARAN 2011-2013 (Analisis Aset dan Analisis Rasio Keuangan)*

Sehubungan dengan itu mohon kiranya dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan Observasi dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.

an. Dekan  
Bantuan Dekan I,<sup>4</sup>  
  
D. D. D. dris, M.Si  
NIP. 19610703 198503 1 005

